MANUVER POLITIK CHINA DALAM KONFLIK LAUT CHINA SELATAN

Athanasius Aditya Nugraha*, Unhan, nathanasius@yahoo.com

Abstrak - *Dalam beberapa tahun terakhir kita bisa mengamati bahwa aktivitas China di Laut China Selatan telah bertambah, baik dari segi frekuensi maupun keagresifan. Kita bisa mengambil asumsi bahwa China sadar bahwa peristiwa-peristiwa tersebut mendapat perhatian dunia dan akan sangat ceroboh apabila tidak dijalankan bersaman dengan manuver politik. Tujuan paper ini adalah mencari tahu apa yang menjadi motivasi di balik tindakan-tindakan tersebut dan langkah politik apa saja yang dilakukan China untuk menguasai Laut China Selatan.*

Abstract - *Over the past few years we have observed that China's activities in South China Sea region have increased, both in frequency and intansity. It is safe to assume that China is aware that incidents have garnered worldwide attention and are therefore reckless unless implemented in tandem with political manouvering. The purpose of this paper to examine exactly what motivates such activities and the political measures undertaken by China to achieve control in the South China Sea.*

Kata Kunci : *Konflik, Laut China Selatan, ekonomi, militer*

PENDAHULUAN

Pada tanggal 27 Mei 2011, Kementerian Luar Negeri Vietnam mengkonfirmasikan bahwa pada 26 Mei 2011 kapal Binh Minh 02 milik PetroVietnam melakukan survei seismik dalam wilayah perairannya, kapal-kapal milik China memotong kabel-kabel eksplorasinya. Kejadian yang terjadi pada 120 mil laut dari Dai Lanh, provinsi Phu Yen [1]. ini bukanlah yang pertama atau satu-satunya. Konfrontasi-konfrontasi yang mirip sering terjadi antara China dan negara-negara tetangganya.

Sebenarnya hal ini tidak begitu mengagetkan megingat bahwa belum lama ini, China mendeklarasikan bahwa Laut China Selatan merupakan salah satu *"core interest"* negara China. Artinya salah satu prioritas Beijing adalah menguasai wilayah Laut China Selatan dan tidak segan untuk mengabaikan kepentingan negara tetangga dan hukum laut internasional.

Tetapi kita ketahui bahwa China tidak cukup kuat atau berani untuk melawan seluruh ASEAN secara besar-besaran. Di situlah peran dari maneuver-manuver politik China dalam meraih ambisinya. Pertanyaan yang cukup konvensional adalah apakah motivasi China dalam menguasai wilayah Laut China Selatan? Serta manuver politik seperti apa yang diterapkan untuk mencapai tujuannya, menguasai Laut China Selatan.

* Athanius Adityan Nugraha, Mahasiswa Program Pasca Sarjana Defense Management UNHAN.

Konflik di Laut China Selatan

Dalam sejarahnya, wilayah Laut China Selatan memiliki peran dan arti geopolitik yang sangat besar karena menjadi titik temu Negara China dengan tetangga-tetangganya terutama yang berada dalam wilayah ASEAN dalam hal sejarah, masalah teritorial, keamanan dan juga hal-hal seperti seumber daya alam dan energy security

Akhir-akhir ini, terutama setelah kejadian pada bulan Mei 2011 kemarin di perariran Vietnam isu-isu teritorial di Laut China Selatan menjadi topik pembicaraan yang kian menghangat. Kejadian-kejadian tersebut mendorong beberapa pihak untuk memikirkan kembali kepentingan serta maksud dan tujuan negara China di kawasan.

Persengketaan China di wilayah ini mencakup dua persoalan utama yaitu kedaulatan teritorial dan kedaulatan maritim. Kedaulatan teritorial membahas tentang kepemilikan wilayah daratan yang ada di daerah ini sementara persengketaan kedaulatan maritim berhubungan dengan penetapan batas yang diijinkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS III) 1982.

UNCLOS menetapkan bahwa kedaulatan teritorial laut adalah 12 mil dari tepi pantai dan Zona Ekonomik Eksklusif (EEZ) sejauh 200 mil. Hal ini penting karena negara yang memiliki kedaulatan atas pulau-pulau tersebut juga berhak memiliki sumber daya alam termasuk gas dan minyak bumi.Dalam ranah teritorial ada beberapa konflik yang terjadi di Laut China Selatan antara lain Macclesfield Bank, Scarborough Shoal, dan pulau Pratas. Namun persengketaan utama yang sedang terjadi di Laut China Selatan adalah perebutan kepulauan Spratly dan Paracel.

Tabel 1. Perebutan kepulauan Spratly dan Paracel

	Kepulauan Spratly	Kepulauan Paracel
Pihak yang bersengketa	RRC, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei (sebagai zona perikanan)	RRC, Taiwan, Vietnam
Signifikansi Geopolitik	Minyak bumi, gas alam, perikanan, jalur perhubungan pelayaran, Selat Malaka	Minyak bumi, gas alam, jalur pelayaran, Selat Malaka
Klaim kepemilikan (dari abad ke-20)	1930-an: Okupasi Perancis PDII: Okupasi Jepang 1951: Jepang menarik klaim dalam San Francisco Treaty; kemudian di klaim Vietnam	1930-an: Okupasi Perancis PDII: Okupasi Perancis 1951: Jepang menarik klaim dalam San Francisco Treaty; kemudian di klaim Vietnam 1959: Perancis menarik diri, kepulauan dikuasai Vietnam Selatan 1959: Diklaim oleh RRC
Administrasi saat ini	RRC, Taiwan, Malaysia, Filipina dan Vietnam dimana Vietnam menguasai sebagian besar dari pulau-pulau.	Propinsi Hainan di RRC

Konflik dan perkembangan yang penting	1974: RRC dan Vietnam 1988: Konflik Johnson Reef antara RRC dan Vietnam 1992: RRC & Vietnam (Da Lac Reef) 1995: RRC &Filipina (Mischief Reef) 2002: ASEAN Declaration of Conduct (DoC)	1974: RRC Vietnam (Pertempuran Kepulauan Paracel) 2002: ASEAN Declaration of Conduct

Sumber: http://www.china-briefing.com/news/2011/05/31/chinas-teritorial-disputes-in-the-south-china-sea-and-east-china-sea.html

Laut China Selatan Sebagai Sumber Hidrokarbon

Wilayah Laut China Selatan terdiri dari, antara lain, beberapa pulau kecil yang tersebar luas. Dua kelompok pulau yang banyak diperebutkan adalah kepulauan Spratly dan Paracel. Tetapi apabila kita lihat, sebenarnya nilai ekonomis dua kepulauan tersebut, dalam konteks sumber daya alam yang ada di daratannya, tidak begitu signifikan. Fitur-fitur fisik utama dari pulau-pulau tersebut adalah batuan, terumbu karang, pasir dan beberapa lainnya yang berada di bawah laut dan tanahnya tidak sesuai untuk bercocok tanam dan dalam sejarahnya pulau-pulau tersebut juga tidak mampu menyokong kehidupan dan aktivitas manusia [2].

Namun, pada tahun 1968 ditemukan cadangan minyak bumi yang menaikkan nilai Laut China Selatan secara dramatis [3]. Cadangan minyak di laut China Selatan diperkirakan sebesar 7,5 barrel dan saat ini produksi minyak bumi mencapai 1,3 juta barrel per hari, yang setengahnya adalah hasil produksi Malaysia. Produksi minyak juga terlihat meningkat pada tahun-tahun terakhir karena adanya produksi tambahan dari China, Malaysia dan Vietnam.

Tabel 2. Minyak dan Gas Alam di wilayah Laut China Selatan

	Cadangan Minyak yang dikonfirmasi (milyar barrel)	Cadangan Gas yang terkonfirmasi (Trillion Cubic Feet)	Produksi minyak (Barrel/ Hari)	Produksi gas (Billion Cubic Feet)
Brunei	1.35	14.1	145,000	340
Cambodia	0	0	0	0
China*	1 (est.)	3.5	290,000	141
Indonesia*	0.2	29.7	46,000	0
Malaysia	3.9	79.8	645,000	1,300
Philippines	0.2	2.7	<1,000	0
Singapore	0	0	0	0
Taiwan	<0.01	2.7	<1,000	30
Thailand	0.3	7.0	59,000	482
Vietnam	0.6	6.0	180,000	30
TOTAL	7.5 (est.)	145.5	1,367,000	2323

Sumber: http://www.southchinasea.org/scs intro-t1.html

Ditemukannya cadangan-cadangan minyak di negara-negara tersebut menimbulkan spekulasi bahwa kepulauan Spratly dan Paracel merupakan daerah kaya minyak yang be;um dieksplorasi. Cadangan minyak potensial di kepulauan Spratly dan Paracel diperkirakan sampai 105 milyar barrel dan di seluruh Laut China Selatan sebanyak 213 milyar barrel [4]. Meskipun bukti keberadaan cadangan tersebut belum begitu kuat, perkiraan China yang optimis ini menimbulkan ketertarikan besar terhadap wilayah ini.

Sumber daya hidro karbon Laut China Selatan yang sering dilupakan adalah gas alam. Bahkan gas alam diperkirakan sebagai sumber daya hidrokarbon yang jumlahnya paling banyak. Menurut estimasi Survei

Geologi Amerika Serikat (USGS) 60% - 70% hidrokarbon di kawasan merupakan gas alam. Sementara itu, penggunaan sumber daya gas alam diproyeksikan bertambah sebanyak 5% per tahun untuk dua dekade yang akan datang. Jumlahnya diperkirakan Sebanyak 20 trillion cubic feet (Tcf) per tahun, lebih cepat daripada bahan bakar lainnya. Aktifitas pembangunan di kawasan ini juga akan menambah konsumsi bahan bakar. Karena itu kawasan ini menjadi sangat strategis bukan hanya karena adanya potensial cadangan bahan bakar yang banyak tetapi juga karena tersedianya infrastruktur-infrastruktur yang sudah dibangun yang dapat membantu eksplorasi dan distribusi bahan bakar seperti helipad, dermaga dan jalur-jalur perkapalan.

Laut China Selatan Sebagai Jalur Pelayaran Penting

Jalur ini seringkali disebut sebagai *maritime superhighway* karena merupakan salah satu jalur pelayaran internasional paling sibuk di dunia. Lebih dari setengah lalu lintas supertanker dunia berlayar melalui jalur ini lewat Selat Malaka, Sunda dan Lombok. Jumlah supertanker yang berlayar melewati selat Malaka dan bagian barat daya Laut China Selatan bahkan lebih dari tiga kali lalu lintas yang melewati Kanal Suez dan lebih dari lima kali lipatnya kanal Panama.

Seperti yang dijelaskan dia atas selama dua puluh tahun ke depan konsumsi minyak bumi di negara-negara Asia akan naik 4% rata-rata per tahun. Apabila laju pertumbuhan tetap konsisten, permintaan minyak bumi akan naik menjadi 25 juta barrel per hari. Mau tidak mau untuk mengatasi permintaan Asia dan Jepang harus dilakukan impor dari Timur Tengah. Kapal-kapal tersebut harus melewati Selat Malaka memasuki Laut China Selatan.

Pelayaran komersial di Laut China Selatan didominasi oleh bahan mentah yang menujunegara-negara Asia Timur dan yang melewati Selat Malaka dan kepulauan Spratly sebagian besar adalah kargo cair seperti minyak dan gas alam cair (LNG) sementara kargo kering kebanyakan batubara dan bijih besi.

Setengah volume kargo yang melewati kepulauan Spratly adalah minyak mentah dari teluk Persia Pengangkutan LNG melewati laut China Selatan mewakili dua per tiga dari perdagangan LNG seluruh dunia menuju Jepang, Korea Selatan dan Taiwan.

Tabel 3. Minyak dan Gas Bumi di Kawasan lain

	Cadan-gan Minyak yang dikon-firmasi (milyar barrel)	Cadan-gan Gas yang terkon-firmasi (Trillion Cubic Feet)	Produksi minyak (Barrel/ Hari)	Produksi gas (Billion Cubic Feet)
Cas-pian Sea Region	15.4-29.0	236- 337	1,000,000	2846
Gulf of Mexico (U.S.)	2.7	29.4	1,014,000	5100
North Sea Region	16.8	156.6	6,200,000	7981
Persian Gulf	674.5	1718	19,226,000	5887
South China Sea	7.5	145.5	1,367,000	2323
West Africa/ Gulf of Guinea *	21.5	126.3	3,137,000	200 (est.)

Sumber: http://www.southchinasea.org/scs-intro-t2.html

Signifikansi Strategis Laut China Selatan

Sangat penting untuk diingat bahwa kepentingan China di laut China Selatan tidak terbatas pada energy security maupun wilayah perikanan dan perdagangan. Daerah tersebut juga penting untuk strategy militer, khususnya manuver kapal selam nuklir dan *deterrence.*

Dalam pembicaraan soal konflik laut China Selatan yang cenderung menjadi fokus adalah persoalan energy security, perdagangan dan perikanan. Namun sifat fisik dari Laut China Selatan, yaitu wilayah perairan yang semi-tertutup, merupakan unsur penting dalam strategy nuklir China [5].

Beberapa aktivitas China di wilayah ini mengindikasikan keinginannya untuk membuka jalan untuk proyeksi kekuatan antara lain di tempat lindap seperti Pulau Woody di kepulauan Paracel, dimana China sedang memperpanjang dan memperpaiki landasan. Contoh lain adalah pembangunan struktur-struktur di Mischief. Reef yang terpencil. Banyak memandang semua ini sebagai tindakan tak bersahabat dan memiliki kesan ekspansionis Pelayaran komersial di Laut China Selatan didominasi olehbahan mentah yang menuju negara-negara Asia Timur dan yang melewati Selat Malaka dan kepulauan Spratlysebagian besar adalah kargo cair seperti minyak dan gas alam cair (LNG) sementara kargo kering. Setengah volume kargo yang melewati kepulauan Spratly adalah minyak mentah dari teluk Persia.

China tidak ingin sekedar Menciptakan EEZ yang luas tetapi juga ingin mengendalikan lautan untuk mencapai proyeksi kekuatan yang lebih jauh, termasuk untuk kapal selam rudal nuklir (SSBN), di jalur laut melewati Pasifik dan memasuki Samudra Hindia.

Kemampuan deterrence nuklir berbasis laut meripakan prioritas dalam strategy militer China. China diperkirakan akan memperoleh kemampuan *second-strike* dengan memperkenalkan rudal SLBM JL-2 yang memiliki jangkauan 8000 km dan ICBM DF-31 dan DF-31A. China juga sekarang sedang membangun base kapal selam di Hainan [6]. Menurut International Assessment and Strategy Center di Washington, pangkalan kapal induk pertama akan ada di Pulau Hainan dan akan mempatroli rute-rute pelayaran. China ingin menjadikan wilayah itu sebagai zona teritorial yang dijaga dengan ketat untuk operasi SSBN. Dengan dibangunnya kemampuan maritim tersebut akan memastikan bahwa kapal-kapal dari negara-negara lain akan bertemu dengan kapal perang China [7].

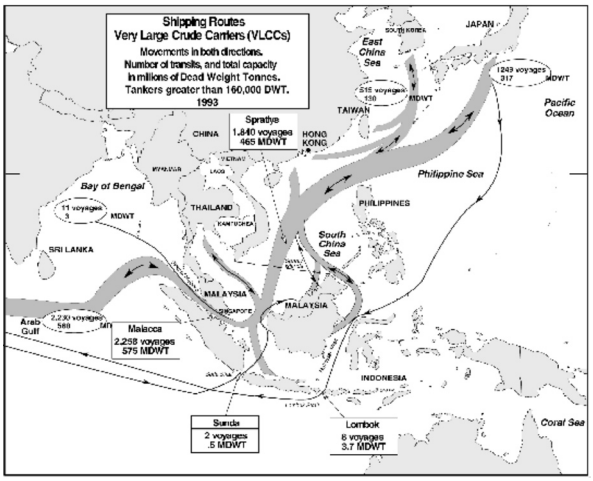

Sumber: http://www.globalsecurity.org/

Saat ini misi utama dari *People's Liberation Army (PLAN)* adalah: 1) Mengamankan kapal masuk Taiwan; 2) menjalankan operasi di Pasifik barat untuk menghalangi musuh; 3) melindungi jalur komunikasi laut China; dan 4) memutus jalur komunikasi musuh. Kemampuan penghalang China, terutama kapal selam tenaga nuklir yang cenderung tidak bersuara, dapat digunakan untuk menangkal operasi kapal selam musuh. Kapal induk China juga akan digunakan untuk membungkam tetangga-tetangganya yang juga memiliki klaim teritorial. Pulau-pulau kecil di Laut China Selatan dapat digunakan sebagai pangkalan intelijen, pengawasan dan pengintaian.

U-Shaped Line

U-Shaped Line atau sering disebut Garis 9 dash merupakan garis demarkasi yang digunakan oleh pemerintah China yang mencakup fitur-fitur utama Laut China Selatan. Wilayah di dalam batas garis tersebut dianggap oleh pemerintah China sebagai wilayah

kedaulatan China. Termasuk di dalamnya adalah kepulauan Dongsha dan Zousha [8]. Wilayah ini juga mencakup kepulauan Spratly (Nansha), yang diperebutkan baik sebagain maupun secara keseluruhan oleh Filipina, China, Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam, dan kepulauan Paracel (Xisha) yang diduduki China namun diperebutkan Vietnam dan Taiwan. Diperkirakan bahwa kepulauan Spratly, terutama, kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak bum [9]. Berikut adalah peta yang menggambarkan U-Shaped line dan wilayah-wilayah yang termasuk di dalamnya. Wilayah ini dibatasi oleh sembilan buah garis putus-putus.

Klaim terhadap daerah-daerah di atas dibuat pemerintah China berdasarkan beberapa hal antara lain sejarah. Menurut pemerintah China bukti sejarah menunjukkan bahwa orang-orang sudah menemukan pulau-pulau di Laut China Selatan lebih dari 2000 tahun yang lalu pada masa dinasti Qin dan dinasti Han. Kemudian dari tahun 960 sampai 1368, orang-orang China memperluas aktivitasnya ke perairanan pulau Zhongsha dan Nansha. Aktivitas-aktivitas China berlanjut terus sampai tahun 1911, dimana wilayah kegiatannya sudah mencakup semua pulau di Laut China Selatan [10].

Klaim China terhadap wilayah ini adalah bahwa garis perbatasan tersebut dibuat berdasarkan proses sejarah yang lama dan memperkokoh kedaulatan China terhadap pulau-pulau di Laut China Selatan beserta perairan sekitarnya. Pada bulan Oktober 1947 pemerintah Kuomintang pertama kali menggambarkan "*garis sebelas dash*" yang menunjukkan klaim wilayah tersebut. Setelah Partai Komunis China menguasai daratan China dan membentuk *People's Republic of China* pada tahun 1949, garis tersebut diubah menjadi garis sembilan dash.

China berargumen bahwa Vietnam, Malaysia dan Filipina bahkan tidak sepenuhnya menyadari keberadaan pulau-pulau Laut China Selatan sebelum era dinasti Qing (1644 – 1911) dan tidak ada bukti bahwa nenek moyang mereka pernah aktif di wilayah itu. China juga mengaku berhak karena merupakan negara satu-satunya yang secara terus menerus melakukan pembangunan di Laut China Selatan.

Peta yang memuat garis ini, beserta klaim wilayah dalam garis tersebut, diserahkan kepada PBB pada tahun 2009 yang langsung disambut dengan protes resmi dari Filipina, Vietnam Malaysia, Brunei, Taiwan dan Indonesia [11].

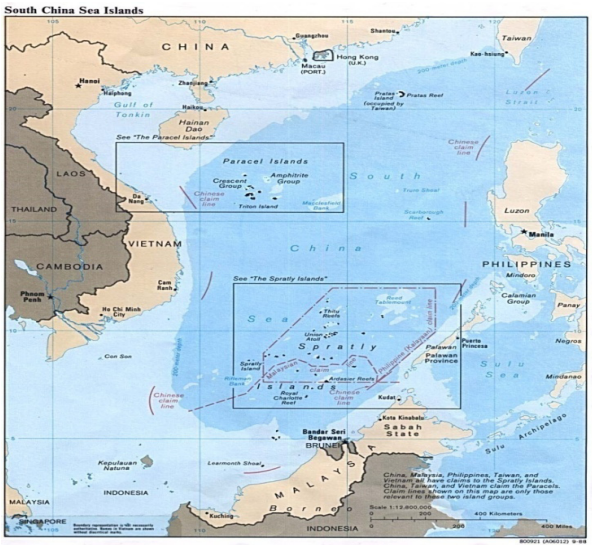

Sumber: http://www.lib.utexas.edu/maps/asia.htm

Salah satu masalah penting adalah garis demarkasi. Garis tersebut tidak kontinyu dan tidak ada peta yang bisa menunjukkan seperti apa bentuknya apabila dibuat menyambung. Karena tidak pernah ada penjelasan dari pihak China, maka tidak ada yang tahu arti dan tujuan sebenarya pembuatan garis tersebut dalam konteks strategi. Beberapa ahli mengatakan bahwa 9 dash line ini tidak bisa disahkan sebagai perbatasan teritorial karena tidak sesuai dengan hukum internasional yang mengatakan bahwa perbatasan teritorial harus stabil dan terdefinisi dengan baik. Garis tersebut tidak stabil kerena dengan mudah bisa berubah dari sebelas menjadi sembilan garis tanpa alasan jelas dan tidak terdefinisi

dengan baik karena tidak memiliki koordinat geografis spesifik dan tidak menjelaskan bentuknya apabila semua garis tersebut dihubungkan [12].

Menurut hukum internasional, perairan dapat disahkan sebagai perairan historis apabila memenuhi paling tidak dua persyaratan di berikut:

1. Di dalam daerah yang bersangkutan, negara harus benar-benar menerapkan kedaulatannya secara terus menerus, secara damai dan dalam jangka panjang
2. Diterima secara terbuka, ataupun secara diam, tanpa perlawanan dari negara-negara lain, terutama negara tetangga yang memiliki kepentingan di wilayah laut tersebut.

Ternyata sangatlah sulit bagi China untuk memenuhi persyaratan pertama. Sebabnya adalah semua dokumen resmi yang tercetak sebelum tahun 1909 menyatakan bahwa ujung paling selatan dari China adalah distrik Nihai di pulau Hainan. Ditambah lagi, peta China yang digambar pada abad ke 17 oleh East India Company menyatakan bahwa daerah China paling ujung mulai di pulau Hainan di lintang 180.

Orang-orang China juga baru menginjakkan kaki di kepulauan Paracel pada tahun 1909 ketika kepulauan ini di bawah kekuasaan Vietnam dan bukan lahan yang tidak berpenghuni. Orang China juga baru tiba di kepulauan Spratly pada tahun 1932.

Menyangkut persyaratan ke dua, pihak China menyatakan bahwa garis U ini sudah ada sejak lama dan selama itu tidak ada negara yang keberatan. Namun, menurut hukum internasional, klaim teritorial harus dideklarasikan secara terbuka dan dipertahankan paling tidak untuk jangka waktu yang cukup untuk memungkinkan adanya protes resmi dari negara lain yang berkeberatan. Dan, aktivitas pertahanan kedaulatan harus dilakukan secara terus terang sehingga aktivitas rahasia tidak dapat diberlakukan sebagai dasar untuk hak historis [13].

ANALISA

Dari pembahasan di atas bisa dilihat bahwa kepentingan China di wilayah Laut China Selatan sangatlah banyak mulai dari kepentingan ekonomi sampai kemampuan proyeksi kekuatan militer dan penggentar nuklir. Namun, usaha-usaha China untuk penetapan wilayah kedaulatan dan perluasan laut teritorialnya dari dulu memang tidak disambut dengan baik oleh negara-negara tetangganya yang selain merasa kadaulatannya dilanggar juga memiliki kepentingan di perairan tersebut.

Disamping itu, penetapan wilayah perairan China secara unilateral bukan hanya tidak memiliki dasar hukum maupun historis yang jelas, tetapi juga melanggar konvensi hukum kelautan PBB (UNCLOS) yang ditandatanganinya pada tahun 1982.

Meskipun negara China secara ekonomi dan militer kuat, belum berani melakukan pembangunan untuk perluasan dan melakukan aktivitas proyeksi kekuatan secara frontal. China masih harus, paling tidak untuk aktivitas perekonomian, mengandalkan aksesi jalur laut yang melewati kawasan ASEAN. Beberapa negara anggota ASEAN juga memiliki hubungan diplomatis kuat dengan Amerika Serikat, contohnya perjanjian keamanan Filipina dengan AS. Oleh karena itu masih sangat penting bagi China untuk mengambil pendekatan diplomatis dan politis dalam menghadapi negara-negara ASEAN.

Penandatanganan DOC:

Salah satu langkah politis yang nyata adalah penandatanganan dokumen *Declaration of Conduct of Parties in the* South China Sea (DOC) dimana semua penendatangan, termasuk China setuju untuk

menjaga stabilitas regional, bekerja sama dan menyelesaikan konflik secara damai. Deklarasi ini juga menyatakan bahwa semua pihak harus menahan diri dan tidak melakukan aktivitas yang memperumit keadaan. Tetapi tampaknya DOC tidak diindahkan karena banyaknya aktivitas pembangunan yang dilakukan China serta tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian di kawasan seperti pemotongan kabel seismik kapal survei Vietnam pada 26 Mei lalu. Pada tanggal 4 Maret terjadi hal yang mirip di *Reed Bank* ketika kapal China mengancam akan menabrak kapal Filipina.

Mengapa baru sakarang kejadian-kejadian seperti ini muncul. Salah satu pemicunya DOC sedang dalam proses *Code of Conduct* yang mengikat secara hukum. China sepertinya tidak bermaksud untuk melakukan kodifikasi tersebut lantaran apabila menandatangani *Code of Conduct* akan mengikat mereka dan kehilangan kebebasan untuk melancarkan aktivitas-aktivitasnya di Laut China Selatan.

Penyelesaian Konflik

Secara resmi, pendekatan China terhadap penyelesaian konflik adalah negosiasi bilateral yang dalam prakteknya dirasakan oleh beberapa pihak sedikit janggal. Sebagai contoh, perebutan kepulauan Paracel merupakan masalah bilateral antara China dan Vietnam dan seharusnya diselesaikan secara bilateral. Persengketaan kepulauan Spratly merupakan perebutan wilayah oleh China, Malaysia, Brunei, Filipina dan Vietnam dan penyelesaiannya harus dengan mekanisme multilateral yang melibatkan semua pihak.

Yang menjadi masalah adalah tujuan dari 'negosiasi' China bukanlah untuk menyelesaikan masalah kedaulatan karena China menganggap bahwa kedaulatan itu milik China dan pihak lawan tidak boleh mengungkit-ungkit soal kedaulatan. Akibatnya tujuan negosiasi China hanya untuk membuat pengaturan sementara, bukan negosiasi untuk menentukan kedaulatan.

Tidak adanya penyelesaian yang konkrit memberi kesempatan pada China untuk semakin memperkuat kekuasaan dan menyebarkan pengaruhnya karena harus diakui bahwa China memiliki '*hard and soft power'* yang memadai untuk mengambil kesempatan itu. Alasan lain mengapa China menuntut negosiasi bilateral adalah apabila China menghadapi negara-negara pengklaim lain secara individual, kemungkinannya untuk menang semakin besar.

Sesuai dengan teori *Defensive Realism,* bahwa suatu kawasan akan stabil apabila kekuatan besar, seperti China, diimbangi dengan kekuatan yang dihasilkan koalisi negara-negara yang lebih kecil. Dalam hal ini adalah ASEAN. China menyadari bahwa tidak mungkin melawan ASEAN secara keseluruhan maka yang dilancarkan adalah *'divide and conquer* [14]. yaitu menumbangkan negara-negara kecil satu demi satu yang hanya bisa dilakukan dengan 'negosiasi' secara bilateral.

Hal yang mendukung kesimpulan tersebut adalah kegusaran China ketika pada pertemuan ASEAN pada tahun 2010 Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton menyatakan bahwa "kebebasan navigasi di Laut China Selatan" merupakan kepentingan Amerika Serikat. China menunjukkan ketidaknyamanannya dengan keterlibatan Amerika dalam persoalan Laut China Selatan dan mengatakan bahwa penyelesaian persengketaan harus dilakukan pihak-pihak yang bersangkutan tanpa intervensi luar [15]. Hal ini mungkin saja dikarenakan kekahawatiran China karena menganggap bahwa keterlibatan AS akan memperkuat negara-negara ASEAN.

KESIMPULAN

Penguasaan wilayah Laut China Selatan

tidak dapat disangkal lagi dapat memberikan China keunggulan di kawasan Asia Pasifik mulai dari kedaulatan wilayah, keunggulan ekonomi dan energi sampai kemampuan strategis militer seperti proyeksi kekuatan dan daya penggentar nuklir. China sudah bertahun-tahun melancarkan aksi-aksi untuk mencapai keunggulan tersebut dan tampak tidak segan untuk menggunakan cara-cara yang legalitasnya dapat dipertanyakan.

Meskipun begitu, kemampuan China melancarkan aksi ini terbatas karena adanya kekuatan-kekuatan penyeimbang seperti ASEAN dan hukum-hukum internasional seperti UNCLOS. Untuk mengakali keterbatasan tersebut China mengandalkan prinsip negosiasi bilateral yang digunakannya untuk menumbangkan negara-negara lawan secara satu demi satu untuk melemahkan kekuatan penyeimbang yang ada.

DAFTAR REFERENSI

[1].http://english.vovnews.vn/Home/Vietnam-accuses-china-of-violating-marine-sovereinty/20115/126991.vov
[2].Knut snildal http://www.prio.no/upload/MCA/Publications/pdf-format/Snildalthesis.pdf
[3].https://blog.canpan.info/oprf/img/858/prof.ban laoi_presentation.pdf
[4]. http://www.globalsecurity.org/military/world/ war/spratly-oil.htm
[5].http://crisisboom.com/2011/07/18/why-china-wants-south-china-sea/
[6].Ibid.
[7].Ibid.
[8].http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2011-07/ 22/content_12956861.htm
[9].http://www.malaya.com.ph/apr14/news4.html
[10].http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2011-07/22/content_12956861.htm
[11].http://newsinfo.inquirer.net/inquirerheadlines/nation/view/20110415-331204/PH-runs-to-UN-to-protest-Chinas-9-dash-line-Spratlys-claim
[12].http://www.presscenter.org.vn/en/?option= com_ content&task=view&id=5290&Itemid=30
[13].Ibid.
[14].http://the-diplomat.com/asean-beat/2011/07/20/negotiating-the-south-china-sea/
[15].http://maritimesecurity.asia/free-2/maritime-secu rity-asia/